



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 14215-14228

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa yang berada di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi)

Herviana Rosalia Suparman^{1✉}, Tina Kartini², Iqbal Noor³

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: hervianars2020@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif. Teknik sampling dalam penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu dan menghasilkan 142 sampel. Data yang digunakan diperoleh dari penyebaran kuesioner. Analisis data diantaranya uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji f dengan alat uji SPSS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dan simultan sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa*

Abstract

This research aims to determine the influence of the internal control system and village apparatus competency on the accountability of village fund management in villages in Sukaraja District, Kab. Sukabumi. This research uses associative quantitative research methods. The sampling technique in the research used a purposive sampling technique with certain criteria and resulted in 142 samples. The data used was obtained from distributing questionnaires. Data analysis includes classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, t test and f test using the SPSS 24 test tool. The results of this research show that partially and simultaneously the internal control system and the competence of village officials influence the accountability of village fund management.

Keywords: *Accountability of Village Fund Management, Internal Control System and Competence of Village Official*

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu entitas pemerintahan yang berada di tingkat paling dasar dalam struktur pemerintahan di Indonesia untuk mengurus pemerintahannya sendiri dalam memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Sebagai penyelenggara pemerintah tingkat lokal, desa memiliki peran penting dalam kemajuan suatu desa. Pemerintah desa berfokus pada pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk mencapai kemajuan tersebut, maka pemerintah pusat memberikan bantuan ke setiap pemerintah desa berupa dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa melalui transfer APBD kabupaten/kota kemudian ke APB desa. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan program pembangunan tersebut sangat bergantung pada pengelolaan dana desa yang efektif.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur semua kegiatan terkait pengelolaan desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan, karena desa memiliki peran atas urusan pemerintahan lokal yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahannya, desa sebagai instansi publik dituntut untuk mewujudkan *good public* dan *corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu karakteristik dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap tindakan dan hasil akhir dari aktivitas pemerintahan di tingkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi juga kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmah dalam Situngkir dan Simarmata 2022).

Namun pada kenyataannya dalam mewujudkan akuntabilitas masih terdapat banyak permasalahan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik mendapat banyak laporan dari masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa. Seperti ketidaktransparanan terkait penggunaan dana desa, *markup* atau penggelembungan anggaran proyek desa, proyek yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan, adanya proyek yang diajukan namun tidak dikerjakan (fiktif), serta ketidaksesuaian aturan dalam pengelolaan dana desa (Purba et.al 2022).

Hasniati juga mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan terkait pelaksanaan dana desa diantaranya laporan pertanggungjawaban yang disusun desa belum memenuhi standar yang berlaku, rentan terhadap manipulasi, APBdesa yang disusun tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya, dalam aspek pengawasan masih kurang efektifnya kinerja inspektorat daerah dalam mengawasi pengelolaan desa lalu kurang teraturnya penanganan pengaduan masyarakat dan kurang jelasnya evaluasi dari pengawasan yang dilakukan camat serta dalam hal sumber daya manusia terdapat potensi masalah dimana tenaga kerja desa dapat terlibat dalam tindakan korupsi karena lemahnya perangkat desa (Prasetyo et al., 2023).

Fenomena yang terjadi yaitu adanya penyalahgunaan dana desa oleh perangkat desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan sepanjang tahun 2022 terdapat banyak kasus korupsi di desa yaitu sebanyak 155 kasus dengan 252 tersangka dan kerugian negara sebesar Rp 381 miliar. Kasus tersebut terjadi karena besarnya alokasi dana desa dan tidak diikuti dengan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023). Selain itu, menurut ICW tingginya kasus korupsi disebabkan belum optimalnya fungsi BPD dalam mengawasi penggunaan anggaran dana desa, keterbatasan dan

ketidaksiapan kepala desa termasuk perangkatnya ketika harus mengelola dana dalam jumlah besar serta keterbatasan akses informasi yang dimiliki oleh masyarakat desa terkait dengan pengelolaan dana desa dan layanan publik (Kompas.com, 2024).

Terdapat kasus korupsi di Sukabumi diantaranya oleh perangkat desa di Kadudampit Sukabumi. Sekretaris Desa Cikhuripan melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 144 juta (Sukabumiupdate.com, 2024). Ombudsman menyatakan penyebab dari korupsi dana desa adalah minimnya kompetensi perangkat desa, tidak adanya keterbukaan serta kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat ditambah adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai perencanaan (Ombudsman Republik Indonesia, 2022). Terkait akuntabilitas, 20 desa di Kabupaten Sorong Selatan Papua belum membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tahun sebelumnya serta rancangan kerja pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi desa (ADD) sedangkan desa-desa tersebut telah mendapatkan surat peringatan. Kondisi ini akan berdampak pada proses pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahap berikutnya sehingga dapat membuat program-program pembangunan tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan (Antaraneews, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya akuntabilitas pemerintah desa.

Akuntabilitas sebagai kontrol penuh yang dimiliki oleh perangkat terhadap semua tindakan yang dilakukan dalam suatu pemerintahan, dimana peran pemerintah desa menjadi krusial dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat desa. Akuntabilitas dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan sejauh mana program-program pembangunan tercapai. Melalui akuntabilitas, setiap transaksi keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses oleh publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Jika pemerintah desa menunjukkan akuntabilitas dengan melaporkan segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya, mereka dapat meningkatkan reputasinya dan mendapatkan dukungan lebih banyak dari para pemangku kepentingan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas dalam pemerintahan diantaranya sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa.

Sistem pengendalian internal digunakan untuk mengontrol sumber daya manusia termasuk kepala desa dan seluruh perangkat desa agar dapat bekerja dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal merupakan serangkaian struktur organisasi, metode dan standar yang dikoordinasikan untuk melindungi aset organisasi, memastikan ketepatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi

dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan (Polutu et al., 2022). Tujuan sistem pengendalian internal yaitu untuk melindungi aset/kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan efektivitas operasional dan mendorong ketaatan hukum dan peraturan (Yuesti, 2023). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, terdapat 5 (lima) unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan sistem ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meningkatkan transparansi dan kualitas pengendalian internal pemerintah desa (Rezkiyanti dalam Laili dan Suhaedi 2023). Sistem pengendalian internal yang lemah dapat membuka peluang bagi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa, kecurangan juga penyalahgunaan dana. Tanpa mekanisme yang efektif dan pengawasan yang belum optimal maka tidak dapat mencegah dan mendeteksi kesalahan, kecurangan dan dana desa dapat disalahgunakan.

Faktor lain yaitu perlu adanya perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan dana desa. Menurut Wibowo, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang didasarkan oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang sesuai oleh pekerjaan (Khaeruman et al., 2021). Peran dan tanggung jawab yang diterima desa harus diimbangi dengan sumber daya yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Simbolon menyatakan terdapat beberapa karakteristik dalam kompetensi yaitu watak (*traits*), motif (*motive*), bawaan (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan atau keahlian (*skill*) (Situngkir & Simarmata, 2022).

Perangkat desa harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan karena semakin baik kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019). Perangkat desa yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan dana desa akan mampu menyelesaikan tugas dengan baik (Pahlawan et.al 2020). Kompetensi perangkat desa akan menciptakan kondisi dimana kebijakan dan tindakan desa didasarkan pada pengetahuan yang kuat, menjaga integritas dan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Mereka akan mampu menjelaskan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait serta mampu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem

pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh desa di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi. Objek dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal, kompetensi perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan BPD di Kecamatan Sukaraja. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel 142 sampel. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan skala *likert*. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yaitu sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa sebagai variabel independen dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), Analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T dan uji F.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Validitas

Dalam penelitian ini, uji validitas diukur dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrumen dalam kuesioner dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi kurang 0,05 dan nilai r hitung $>$ r tabel.

Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan tingkat *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6.

Uji Normalitas

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		142
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,07838737
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,068
	Negative	-,071
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,079 ^c

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* yaitu > 0.05 yaitu sebesar 0.079. Dengan demikian data pada penelitian iniberdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,891	2,101		5,185	,000		
Sistem Pengendalian Internal	,127	,048	,200	2,613	,010	,688	1,455
Kompetensi Perangkat Desa	,478	,069	,531	6,947	,000	,688	1,455

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa angka toleransi $> 0,10$ dan VIF < 10 . Dengan demikian penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardize		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4,737	1,148			4,128	,000
Sistem Pengendalian Internal	-,049	,026	-,183		-1,835	,069
Kompetensi Perangkat Desa	-,022	,038	-,059		-,587	,558

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai sig 0,069 > 0,05 dan kompetensi perangkat desa memiliki nilai sig 0,558 > 0,05 Dengan demikian penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis regresi Linear Berganda

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Unstandardized		Standardize		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	10,891	2,101			5,185	,000
Sistem Pengendalian Internal	,127	,048	,200		2,613	,010
Kompetensi Perangkat Desa	,478	,069	,531		6,947	,000

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan :

$$Y = 10,891 + 0.127 X_1 + 0.478 X_2 + e$$

Keterangan :

1. Nilai konstansa sebesar 10,891 menunjukkan bahwa apabila variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa dianggap konstan, akuntabilitas pengelolaan dana desa akan bernilai sebesar 10,891.

- Koefisien regresi sistem pengendalian internal (X1) memiliki nilai sebesar 0.127 bernilai positif. Dengan demikian berarti bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin meningkat.
- Koefisien regresi kompetensi perangkat desa (X2) memiliki nilai sebesar 0.478 bernilai positif. Dengan demikian berarti bahwa semakin baik kompetensi perangkat desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin meningkat.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,664 ^a	,441	,433	2,09329

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai R yang diperoleh yaitu sebesar 0,433 yang berarti 43.3% akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa sedangkan sisanya sebesar 56,7 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Hasil Uji T

Tabel 6
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,891	2,101		5,185	,000
	Sistem Pengendalian Internal	,127	,048	,200	2,613	,010
	Kompetensi Perangkat Desa	,478	,069	,531	6,947	,000

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji t diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel secara parsial yaitu sebagai berikut :

- Pengaruh sistem pengendalian intenal (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) menunjukkan nilai t hitung 2,613 > t tabel 1,977 dengan nilai signifikansi 0,010 < 0,05.

Dengan demikian, bahwa variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh kompetensi perangkat desa (X2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) menunjukkan nilai t hitung $6,947 > 1,977$ dengan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$. Dengan demikian, bahwa variabel kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Uji F

Tabel 7

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	480,423	2	240,212	54,820	,000 ^b
	Residual	609,077	139	4,382		
	Total	1089,500	141			

Sumber : Data diperoleh melalui perhitungan SPSS

Berdasarkan hasil uji f diatas, bahwa hasil nilai f hitung $54,820 > f$ tabel $3,06$ dengan signifikansi $0,000 < 0.05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian uji t, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Hal ini berdasarkan uji signifikansi variabel sistem pengendalian internal menunjukkan nilai t hitung $2,613 > t$ tabel $1,977$ dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ sehingga hipotesis diterima. Sistem pengendalian internal memungkinkan adanya evaluasi, pemantauan dalam pengelolaan dana desa dan sistem pengendalian internal yang efektif perangkat desa dapat lebih mudah mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan sehingga dapat membantu memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang telah ditetapkan sehingga tujuan dapat tercapai. Selain itu, dengan sistem pengendalian internal juga risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Mekanisme kontrol seperti pemisahan tugas terkait tugas dan wewenangnya masing-masing, otorisasi transaksi serta aktifnya peran pengawas internal akan berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kartawinagara dan Rahayu (2023) serta penelitian oleh Juandi dan Rizqi (2024) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian uji t, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Hal ini berdasarkan uji signifikansi variabel kompetensi perangkat desa menunjukkan nilai t hitung $6,947 > t$ tabel $1,977$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ sehingga hipotesis diterima. Perangkat desa yang kompeten dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan mampu menyusun anggaran, membuat laporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu sehingga dapat memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan menjadi semakin akuntabel.

Pemahaman yang baik mengenai peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa akan mampu menerapkan prosedur yang benar dalam pengelolaan dana mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur ini penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu perangkat desa yang kompeten cenderung lebih jujur dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Mereka memiliki integritas dan etika kerja yang tinggi sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan dan penyalahgunaan dana. Hal ini dapat membantu bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir dan Simarmata (2022) dan penelitian Pahlawan et al., (2020) yang menunjukkan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian uji f, penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Hal ini berdasarkan uji signifikansi variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa menunjukkan nilai f hitung $54,820 > f$ tabel $3,06$ dan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$, sehingga hipotesis dapat diterima. Sistem pengendalian internal yang kuat dan kompetensi perangkat desa yang kompeten akan menjadikan pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif. Pengendalian internal memberikan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi perangkat desa memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan

untuk mencapai tujuan pengelolaan dana dengan efisien.

Ketika sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berfungsi secara bersamaan dapat mengurangi risiko kecurangan penyalahgunaan dana. Pengendalian internal yang baik mengidentifikasi dan memitigasi risiko sementara perangkat desa yang kompeten mampu menjalankan prosedur pengendalian ini dengan benar dan memiliki etika kerja yang tinggi untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa sangat penting dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang efisien dan akuntabel sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Purba et al., (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terkait dengan Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa yang berada di Kecamatan Sukaraja Kab. Sukabumi) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t hitung $2,613 > t$ tabel $1,977$ dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$. Hal itu berarti bahwa sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa memiliki nilai t hitung $6,947 > 1,977$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal itu berarti bahwa kompetensi perangkat desa secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa memiliki nilai f hitung $54,820 > f$ tabel $3,06$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal itu berarti secara simultan sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews. (2024). *20 Kampung Di Sorsel Terancam Tidak Dapat Kucuran Dana Desa*. Antaraneews.Com. <https://www.antaranews.com/Berita/3997230/20-Kampung-Di-Sorsel-Terancam-Tidak-Dapat-Kucuran-Dana-Desa>
- Juandi, M. W. M., & Rizqi, R. M. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan

- Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Muhammad Wahyu Miftah Juandi 1 Dan Reza Muhammad Rizqi 1*. *Seminar Nasional Manajemen Inovasi*, 2(21), 291–300.
- Kartawinagara, D. F., & Rahayu, S. (2023). ... Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Yang Berada Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1133–1142.
<https://Openlibrarypublications.Telkomuniversity.Ac.Id/Index.Php/Management/Article/Download/19896/19262>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pub. L. No. 20 (2018). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/139714/Permendagri-No-20-Tahun-2018>
- Khaeruman, Marnisasah, L., Idrus, S., Irawati, L., Farradia, Y., Erwantiningsih, E., Hartatik, Supatmin, Yuliana, Aisyah, N., Natan, N., Widayanto, Mutinda Teguh, & Ismawati. (2021). Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia Konsep & Studi Kasus. In *Bookchapter* (Pertama). Cv. Aa. Rizky.
- Kompas.Com. (2024). *Pemerintah Diminta Aktif Dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa*. Kompas.Com.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/05/20/17003241/Pemerintah-Diminta-Aktif-Dan-Perketat-Pengawasan-Pengelolaan-Dana-Desa>
- Laili, N., & Suhaedi, W. (2023). Mantap: Journal Of Management Accounting, Tax And Production E-Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Barat. *Mantap: Journal Of Management Accounting, Tax And Production*, 1(2), 146–154.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Mengawasi Dana Desa*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://Www.Ombudsman.Go.Id/Perwakilan/News/R/Pwkmedia--Mengawasi-Dana-Desa>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://Doi.Org/10.32400/laj.29261>
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101.

<https://doi.org/10.37905/Jar.V3i2.53>

- Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Ji@P*, 12(2), 219–234. <https://doi.org/10.33061/Jp.V12i2.9010>
- Purba, S., Saragih, R., & Sembiring, Tika Meisiska Br. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129.
- Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023). *Kenali Berbagai Modus Korupsi Di Sektor Desa*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republika.Co.Id. (2022). *Kasus Korupsi Kades Di Sukabumi, Uang Beli Ambulans Dipakai Belanja Mobil Pribadi*. Republika.Co.Id. <https://news.republika.co.id/berita/R6f0tn377/kasus-korupsi-kades-di-sukabumi-uang-beli-ambulans-dipakai-belanja-mobil-pribadi>
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Samosir). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 96–104. <https://doi.org/10.51510/Jakp.V5i2.987>
- Sukabumiupdate.Com. (2024). *Diduga Gelapkan Blt Dana Desa, Sekdes Di Kadudampit Sukabumi Diburu Polisi*. Sukabumiupdate.Com. <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/135800/diduga-gelapkan-blt-dana-desa-sekdes-di-kadudampit-sukabumi-diburu-polisi>
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481.
- Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawa.